

**Asep Setiawan,
Endang Sulastri dan Sumarno**

MODEL POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BERBASIS KERAKYATAN

Dalam Mendukung Pelaksanaan
Diplomasi yang Bermartabat

**UMJ PRESS
2018**

**MODEL POLITIK LUAR NEGERI
BERBASIS KERAKYATAN**

OLEH

Drs. ASEP SETIAWAN MA

Dr. ENDANG SULASTRI M.Si

Drs. SUMARNO M.Si

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH JAKARTA

SEPTEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas selesainya buku panduan Model Politik Luar Negeri Indonesia Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Pelaksanaan Diplomasi Bermartabat. Buku panduan ini disusun sebagai basis model dalam formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai situasi dan dengan fokus berbagai bidang.

Dalam buku panduan pemodelan politik luar negeri ini dijelaskan tahapan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan faktor-faktor domestik dan internasional. Dengan input dari bidang internasional dan juga respons domestik maka para pengambil kebijakan dapat melakukan formulasi serta implementasi yang lebih efektif. Selain sumber masukan bagi pengambil kebijakan, model ini juga dapat dimanfaatkan kalangan akademisi dalam kajian politik luar negeri Indonesia yang berbasiskan kepada kasus-kasus khusus atau kebijakan di bidang tertentu.

Tim penulis berharap pemodelan ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan model-model politik luar negeri dengan kekhasan Indonesia. Dengan adanya model politik luar negeri ini juga harapannya kajian politik luar negeri Indonesia juga dapat berkembang. Tim penulis menyadari model yang diajukan ini masih penuh dengan kelemahan oleh karena itu sumbang saran dari para pembaca termasuk kalangan akademisi sangat ditunggu.

Jakarta, 17 September 2018

Asep Setiawan, Endang Sulastri dan Sumarno

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PANDUAN	2
1.3 CAKUPAN PANDUAN	3
BAB II LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN MODEL	
POLITIK LUAR NEGERI BERBASIS KERAKYATAN	5
2.1 PENDAHULUAN	5
2.2 PEMETAAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL	6
2.3 PENENTUAN PRIORITAS KEPENTINGAN NASIONAL	10
2.4 PROSES DALAM PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT	11
2.5 PERTIMBANGAN BUDAYA DAN PERSONALITY	13
2.6 FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	14
2.6 FEED BACK DARI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	17
BAB III PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

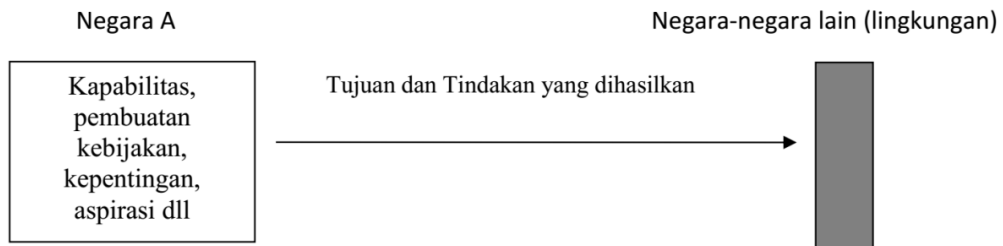
1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan internasional dan nasional menjadi determinan dalam formulasi dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Kedua faktor penentu ini setiap kali mempengaruhi bagaimana output politik luar negeri. Faktor-faktor tersebut telah menjadi acuan dalam menentukan kebijakan luar negeri apakah yang sifatnya strategis maupun yang sifatnya teknis.

Dengan pemetaan yang tepat mengenai faktor penentu politik luar negeri itu, maka Indonesia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya baik ketika krisis terjadi maupun ketika situasi normal. Politik luar negeri yang berbeda dengan politik nasional merupakan respons terhadap perkembangan internasional dan berdampak kepada situasi nasional.

K.J. Holsti menggambarkan bagaimana politik luar negeri ini digambarkan dalam konteks yang berbeda dengan politik internasional. Model ini menunjukkan bahwa sebenarnya politik luar negeri adalah respons terhadap lingkungan luar termasuk di dalamnya adalah negara dan non negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Gambar 1
Model Umum Politik Luar Negeri



Sumber: Holsti (1992)

Dengan gambar seperti itu maka kebijakan luar negeri diharapkan dapat menghasilkan sasaran yang dikehendaki oleh sebuah negara. Dari model itulah maka dapat dikatakan bahwa diperlukan sebuah pemodelan yang lebih detil bagaimana politik luar negeri itu diformulasikan yang kemudian diimplementasikan dan kemudian dijadikan feedback hasil dari kebijakan itu.

1.2 TUJUAN PANDUAN

Panduan pemodelan Politik Luar Negeri Indonesia Berbasis Kerakyatan ini disusun untuk kalangan akademisi, mahasiswa dan pengambil keputusan di pemerintahan dengan tujuan :

1.2.1 Memberikan pedoman mengenai penyusunan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik internasional, nasional, birokrasi maupun public.

1.2.2 Memberikan panduan bagaimana kebijakan luar negeri yang berbasiskan kepentingan nasional melalui proses yang berkelanjutan dengan feedback tertentu.

1.2.3 Menjadikan model ini sebagai basis dalam menganalisis dan menyusun kebijakan luar negeri di bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial dan budaya.

1.3 CAKUPAN PANDUAN

Untuk mencapai tujuan tersebut maka panduan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.3.1 Pemetaan Lingkungan Internasional dan Nasional

1.3.2 Penentuan Prioritas Kepentingan Nasional

1.3.3 Proses dalam Struktur Pemerintah dan Masyarakat

1.3.4 Pertimbangan Perspektif Budaya dan Non Budaya

1.3.5 Formulasi Kebijakan Luar Negeri

1.3.6 Implementasi Kebijakan Didukung Organisasi dan Anggaran

1.3.7 Feed Back (umpan balik) dari Kebijakan Luar Negeri

BAB II
LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN MODEL POLITIK LUAR
NEGERI BERBASIS KERAKYATAN

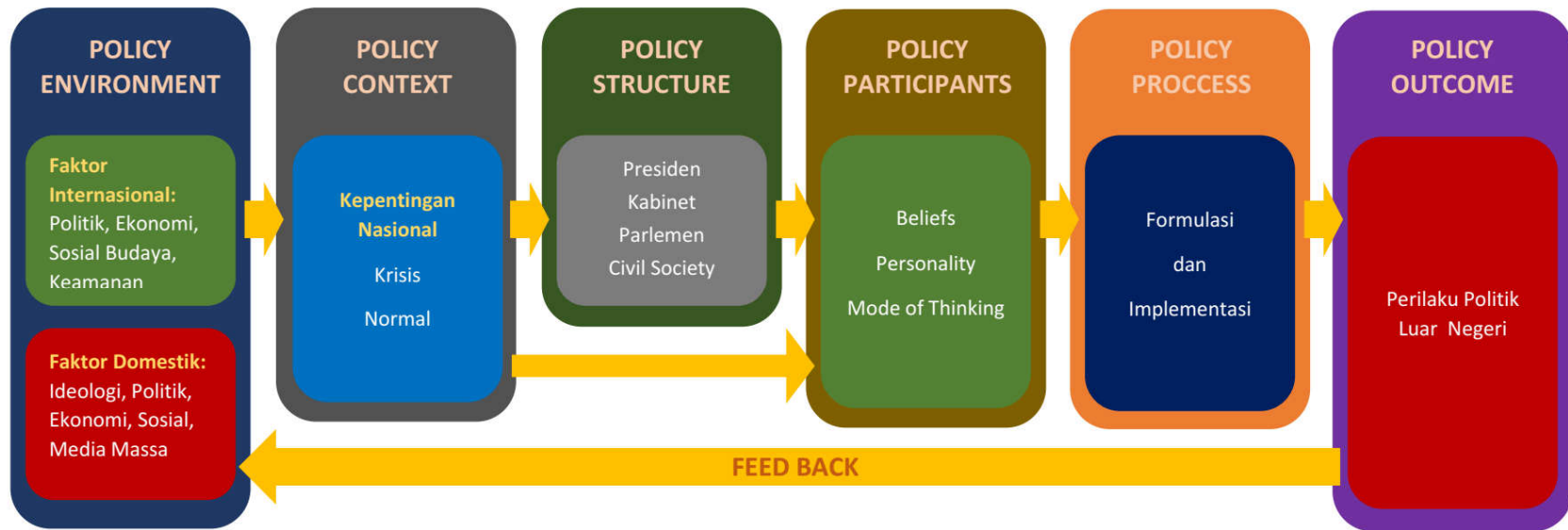
2.1 PENDAHULUAN

Politik luar negeri sebuah negara pada umumnya ditentukan oleh faktor-faktor internasional dan domestik. Kedua faktor ini memiliki pengaruh besar dalam mengkaji perilaku politik luar negeri sebuah negara. Indonesia juga tidak terkecuali dalam perilaku politik luar negerinya ditentukan faktor internal dan internasional.

Model yang dibuat dalam panduan ini berasal dari studi kasus perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Malaysia yang diterjemahkan sebagai politik luar negeri pro rakyat dan kemudian diteruskan dengan diplomasi pro rakyat. Langkah-langkah yang diambil dalam proses formulasi dan implementasi Politik Luar Negeri Berbasis Kerakyatan ini mengacu kepada proses yang dimulai dari identifikasi faktor nasional dan internasional.

Berbagai pertimbangan diambil para pengambil kebijakan mengacu kepada kepentingan nasional yang ditentukan pemerintahan yang sekarang di Indonesia berganti setiap lima tahun. Dengan adanya siklus pemerintahan setiap lima tahun maka prioritas politik luar negeri ini juga dapat berubah-ubah. Model ini dibuat berdasarkan studi mengenai perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Malaysia yang jumlahnya jutaan orang. Formulasi model ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

GAMBAR 2
MODEL POLITIK LUAR NEGERI BERBASIS KERAKYATAN



Sumber: Rosenau (1976), Rosati (1981), Gustavsson (1999), Peneliti

2.2 PEMETAAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Faktor internasional yang mempengaruhi dalam kebijakan melindungi pekerja migrant di Malaysia adalah adanya peluang kerja terutama untuk penata rumah tangga atau lebih populer disebut sebagai domestic workers atau pembantu rumah tangga. Ini dapat disebut sebagai faktor ekonomi dimana warga Indonesia memiliki peluang untuk bekerja di Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja terutama di bidang tatalaksana rumah serta perkebunan. Dengan jumlah penduduk Malaysia sekitar 27 Juta jiwa kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan klasifikasi *low labour skills* cukup tinggi.

Gambar 3
Faktor Internasional

Faktor Internasional	
Politik	Malaysia sebagai negara sahabat Indonesia
Ekonomi	Peluang kerja di Malaysia yang terbuka
Sosial Budaya	Kesamaan sosial budaya dalam Bahasa, Makanan, Agama dan Kebiasaan
Keamanan	Malaysia sebagai negara yang aman dari ancaman keamanan seperti terrorisme, perang dan kejahatan

Dalam wawancara dengan kepala bidang politik KBRI di Kuala Lumpur, Agung Sumirat (2018), Indonesia memberikan kesempatan kepada warga Indonesia sekaligus juga perlindungan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang pekerjaan mereka baik sebagai pembantu rumah tangga, pekerja pabrik dan juga pekerja di

pekerbunan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana peluang kerja di luar negeri ini diatur sedemikian rupa dengan regulasi sejak keberangkatan. Dalam konsep yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri RI yang bekerjasama dengan Badan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia proses di dalam negeri menjadi landasan bagi tersedianya lapangan kerja di Malaysia.

Faktor ekonomi di luar negeri ini memberikan kemungkinan bagi para pekerja Indonesia untuk menempuh bidang kerja terutama sebagai pembantu tata laksana rumah tangga. Faktor kebutuhan rumah tangga di Malaysia yang tinggi terhadap low labour skills ini menyebabkan tingginya keinginan dari WNI untuk bekerja di sana. Jutaan orang Indonesia di Malaysia bekerja namun sebagai orang asing memiliki berbagai ketentuan yang tidak dapat dilanggar.

Faktor politik di lingkungan internasional adalah adanya hubungan baik Indonesia dengan Malaysia yang memberikan peluang bagi para pekerja dapat memasuki wilayah kerja di berbagai wilayah di Malaysia mulai dari desa sampai kota. Adanya sistem politik di Malaysia yang demokratis dan terbuka menyebabkan peluang itu terbuka. Hubungan baik kedua negara sebagai sesama anggota ASEAN juga memberikan atmosfer bagi kemudahan WNI dalam bekerja di sana.

Faktor Sosial di lingkungan internasional juga terdapat di Malaysia karena secara budaya bangsa Malaysia serumpun dengan Indonesia. Adanya kemiripan bahasa, makanan pokok dan juga sosial keagamaan. Bahasa pengantar bagi para pekerja tidak menemui kesulitan karena akar bahasa Melayu yang sama. Warga Malaysia tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan para WNI. Selain kesamaan bahasa

juga adanya kesamaan sosial, budaya dan keagamaan yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Faktor keamanan dan pertahanan juga muncul karena di Malaysia tidak ada ancaman keamanan terhadap pekerja Indonesia. Pada umumnya majikan dari Malaysia bersikap baik meskipun dalam sejumlah kasus terhadap beberapa kejadian dimana adanya penyiksaan namun secara umum bersahabat dan ramah bagi pekerja Indonesia. Selain itu tidak ada ancaman kekerasan seperti konflik, perang dan tindak terorisme yang dapat mengancam para pekerja Indonesia.

Faktor domestik yang menjadi lingkungan bagi para pengambil kebijakan luar negeri adalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan media. Yang dimasukkan lingkungan dari aspek politik domestik adalah kebijakan luar negeri yang mengacu kepada program pemerintah yang jadi prioritas era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014. Faktor politik yang muncul dari pemilihan presiden ini disatu sisi memberikan keunikan dan penerjemahan dari pesan-pesan konstitusional untuk menjadi kebijakan luar negeri yang dibawah kendali presiden dan pemerintahannya.

Gambar 4
Faktor Domestik

Faktor Domestik	
Ideologi	Ideologi Pancasila tidak berseberangan dengan ideology negara Malaysia
Politik	Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia

Ekonomi	Adanya kebutuhan para pekerja untuk bekerja di luar negeri termasuk Malaysia karena adanya peluang dan kemampuan serta fasilitas dari pemerintah dan swasta
Sosial	Munculnya anggapan sosial bahwa bekerja di luar negeri gaji dan fasilitas lebih bagus, bergengsi
Media Massa	Media massa memberikan informasi yang luas terhadap peluang bekerja di luar negeri

Faktor ekonomi yang melandasi dari kebijakan pro rakyat adalah kebijakan untuk membuka peluang bekerja di luar negeri karena adanya dorongan dari sisi kebutuhan ekonomi serta peluang ekonomi dari negara yang terbuka seperti Indonesia. Tidak ada larangan terhadap kepergian para pekerja migrant sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain faktor politik dan ekonomi ada juga faktor sosial budaya dimana ada masyarakat Indonesia memiliki kemampuan secara sosial mengakses lapangan kerja di luar negeri. Di Indonesia terdapat kantong-kantong wilayah pengirim tenaga kerja ke Malaysia juga negara lain seperti Hongkong dan Arab Saudi.

Faktor media massa juga menjadi salah satu yang ikut mempengaruhi keputusan pemerintah karena memberikan gambaran mengenai peluang-peluang kerja di luar negeri. Namun media mass juga memberikan laporan bagaimana perlindungan tenaga kerja di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Media juga membantu melaporkan adanya kasus kekerasan yang menimpa para tenaga kerja ini sekaligus memberitakan majikan yang dianggapnya bersalah. Keterbukaan kebijakan pemerintah ini memberikan rasa percaya diri dalam bekerja di luar negeri.

2.7 PENENTUAN PRIORITAS KEPENTINGAN NASIONAL

Dalam pemodelan kebijakan luar negeri berbasis kerakyatan ini ada dua konteks yang melatarbelakangi yakni situasi krisis dan situasi normal. Yang disebut situasi rutin adalah kebijakan yang disusun berdasarkan rencana yang sudah dikaji sebelumnya. Sedangkan situasi yang krisis adalah kebijakan luar negeri yang merupakan respons terhadap situasi di dunia internasional dan juga dalam negeri.

Dalam politik luar negeri yang berbasis kerakyatan yang kemudian diterjemahkan kedalam diplomasi pro rakyat maka dapat dikatakan bahwa konteks yang tepat dalam kebijakan kali ini adalah yang sifatnya rutin, bukan krisis. Tidak ada alasan yang merujuk kepada krisis dalam penanganan TKI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia.

Gambar 5
Faktor Lingkungan Kebijakan

Policy Context	Kepentingan Nasional
Normal	Dalam keadaan normal maka prioritas kepentingan nasional berbasiskan kepada amanat Pembukaan UUD 1945 namun disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
Krisis	Dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja di luar negeri termasuk di Malaysia, saat ini dalam keadaan tidak dalam krisis. Artinya tidak ada perang, konflik atau ancaman keamanan.

Dimaksud rutin di sini karena kalau merujuk kepada kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014 terdapat sejumlah alasan dalam menempatkan prioritas kebijakan luar negeri. Seperti dalam rujukan yang menjadi

kebijakan Kemenlu tahun 2014 tampak bahwa perumusannya kebijakan bersifat alasan yang rasional dan berbasiskan kepada kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh presiden.

2.8 PROSES DALAM PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Yang dimaksud policy structure adalah struktur politik infrastruktur dan suprastruktur. Yang dimaksud struktur infrastruktur adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Sedangkan yang infrastruktur antara lain adalah DPR dan masyarakat sipil termasuk di dalamnya media massa dan organisasi kemasyarakatan.

Model politik luar negeri berbasis kerakyatan ini mendasarkan kepada lembaga-lembaga pengambil kebijakan yakni lembaga kepresidenan, kabinet pemerintahan, DPR (parlemen) dan Civil Society dimana didalamnya terdapat ormas, tokoh masyarakat dan intelektual serta media massa.

Gambar 6
Faktor Struktur Pengambil Kebijakan

Policy Structure	
Presiden	Presiden dan lembaga kepresidenan merupakan pejabat eksekutif yang mengambil keputusan tertinggi. Dalam konteks kekuasaan pemerintahan di Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan yang sudah diatur dalam UUD 1945.
Kabinet	Para menteri sebagai pembantu presiden mengartikulasikan prioritas kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan. Kementerian Luar Negeri melakukan

	rencana strategis lima tahunan sesuai dengan usia pemerintahan.
Parlemen	DPR, DPD dan MPR memiliki kewenangan sebagai lembaga legislative. Kekuasaan DPR diatur secara undang-undang dalam kebijakan luar negeri. Lembaga legislative juga memiliki mitra dengan lembaga sesame jenisnya di luar negeri.
Civil Society	Dengan adanya demokratisasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri maka civil society yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan, media massa, kelompok intelektual dan tokoh masyarakat menjadi bagian dalam masukan untuk kebijakan luar negeri.

Dalam model ini presiden termasuk lembaga kepresidenan merupakan institusi yang dominan dalam pengambilan kebijakan luar negeri terutama berkaitan dengan karakter pro rakyat. Hal ini merupakan janji dari presiden dan wakil presiden seperti disampaikan dalam visi dan misi saat berkampanye. Oleh karena itu maka presiden sebagai pemimpin eksekutif memiliki kebijakan yang langsung diarahkan sesuai dengan janji-janjinya.

Kabinet di dalam pemerintahan juga memiliki peran penting dalam menerjemahkan apa yang disebut politik luar negeri pro rakyat. Kementerian Luar Negeri seperti disebutkan sebelumnya memformulasikan dengan jelas bahwa perlindungan WNI dan Badan Hukum di luar negeri menjadi prioritas dalam politik luar negeri.

DPR sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kebijakan pemerintah juga tidak lepas dalam mengawal politik luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi mitra Komisi 1 DPR dalam menjelaskan kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah. Selain mengawasi kebijakan pemerintah di bidang luar negeri,

DPR juga memiliki tugas memberikan masukan kepada para duta besar yang akan dtugaskan ke luar negeri.

Civil Society di era Indonesia pasca reformasi politik 1998 telah menjadi faktor menentukan dalam kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Salah satu elemen penting dari Civil Society ini adalah berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memperhatikan kebijakan pemerintah termasuk kebijakan luar negeri. Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini mengkritisi dan memberikan masukan kepada kebijakan luar negeri pemerintah melalui media massa atau media lainnya. Oleh karena itulah maka media massa yang menjadi elemen dalam masyarakat sipil Indonesia juga memiliki peran besar menjadi corong publik sekaligus memberikan analisis dan opini terkait kebijakan luar negeri termasuk dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

2.5 PERTIMBANGAN BUDAYA DAN PERSONALITY

Para pengambil kebijakan baik secara institusional maupun secara personal memiliki gaya dan keyakinannya masing-masing. Demikian juga dalam konteks ini presiden, menteri, pimpinan dan anggota DPR, para tokoh masyarakat, LSM dan bahkan media memainkan peran dalam mempengaruhi formulasi dan bahkan implementasi kebijakan luar negeri pro rakyat.

Aspek belief ini terkait dengan keyakinan para pengambil kebijakan di tingkat struktur terhadap program-program yang diprioritaskan berdasarkan kepada kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini perlindungan WNI dan Badan Hukum

serta Diaspora. Pemerintah juga menyatakan memprioritaskan kehadiran negara dalam menangani masalah rakyat di dalam dan luar negeri. Belief juga dipengaruhi oleh ideologi bangsa yakni dalam hal ini Pancasila. Belief terhadap perlindungan rakyat di luar negeri termasuk juga lembaga hukum muncul dari keyakinan bahwa negara menghadirkan diri dalam menangani warganya.

Gambar 7
Policy Participants

Policy Participants	
Belief	Aspek ini terkait dengan keyakinan para pengambil kebijakan di tingkat struktur terhadap program-program yang diprioritaskan berdasarkan kepada kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini perlindungan WNI dan Badan Hukum serta Diaspora. Pemerintah juga menyatakan memprioritaskan kehadiran negara dalam menangani masalah rakyat di dalam dan luar negeri. Belief juga dipengaruhi oleh ideology bangsa yakni dalam hal ini Pancasila.
Personality	Personalitas dari para pengambil kebijakan terutama dalam hal ini presiden dan menteri luar negeri juga memiliki pengaruh bagaimana situasi normal dan krisis ditafsirkan. Dalam konteks kebijakan pro rakyat tercermin dari personality Presiden Jokowi yang menampilkan sisi kerakyatan.
Mode of Thinking	Aspek ini terkait dengan cara berfikir dalam memandang persoalan yang sifatnya bisa analitikal, ideological atau komitmen. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selain bersifat ideological dalam berfikir juga terdapat pragmatism dan analitis.

Yang termasuk dalam kluster ini adalah bagaimana keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu memanfaatkan peluang di luar negeri meskipun dalam tahap sekarang hanya pengiriman pekerja low skills.

Asepk personalitas dari para pengambil kebijakan terutama dalam hal ini presiden dan menteri luar negeri juga memiliki pengaruh bagaimana situasi normal dan krisis ditafsirkan. Dalam konteks kebijakan pro rakyat tercermin dari personality Presiden Jokowi yang menampilkan sisi kerakyatan.

Partisipan dalam pembentukan model politik luar negeri pro rakyat ini juga dipengaruhi asepk mode of thinking. Aspek ini terkait dengan cara berfikir dalam memandang persoalan yang sifatnya bisa analitikal, ideological atau komitmen. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selain bersifat ideological dalam berfikir juga terdapat sisi pragmatisme dan analitis.

2.6 FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Proses pengambil kebijakan luar negeri ini dapat dibagi dalam dua tahap yakni formulasi dan impementasi. Dalam tahap formulasi, Kementerian Luar Negeri menerjemahkan apa yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo termasuk dalam perlindungan WNI di luar negeri yang kemudian diterjemahkan sebagai diplomasi rakyat. Model formulasi yang kemudian adanya implementasi dimulai dari kepentingan nasional Indonesia yang diterjemahkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Model formulasi yang rinci dari Politik Luar Negeri Indonesian Berbasis Kerakyatan ini dapat dilihat dari gambar berikut. Model ini merupakan bagian dari kotak formulasi dan implementasi yang ada di model yang lebih besar. Model ini

merinci lebih jauh mengenai kepentingan nasional yang diterjemahkan dalam bentuk perlindungan WNI dan Badan Hukum di luar negeri.

Gambar 8
Model Formulasi Politik Luar Negeri Berbasis Kerakyatan



Kemudian masih dalam formulasi kebijakan, diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri secara detil. Formulasi ini dikenal sebagai Diplomasi Pro Rakyat yang menunjukkan bahwa pemerintahan era Joko Widodo memberikan tekanan kepada fokus kepentingan rakyat dalam kebijakannya di dalam dan luar negeri. Diplomasi rakyat seperti diulas dalam bab sebelumnya diformulasikan dalam gambaran sebagai berikut. Dalam gambar berikutnya tampak bagaimana perlindungan WNI dan Badan

Hukum di luar negeri ini dijadikan salah satu strategi dalam politik luar negeri berbasis kerakyatan melalui kebijakan kementerian luar negeri yang disebut Diplomasi Rakyat.

Gambar 9
Diplomasi Rakyat



Dalam tahap implementasi ini khususnya dilakukan kementerian luar negeri dengan diplomat yang ditempatkan di Malaysia termasuk di Kuala Lumpur dan Johor. Dari pantauan di lapangan tampak bahwa ketika formulasi kebijakan luar negeri sudah ditetapkan sebagai pro rakyat maka implementasinya antara lain pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dan diaspora yang prima. Beberapa kebijakan dalam perlindungan TKI sudah dilakukan seperti dalam bab sebelumnya

mulai dari paradigma pengiriman sampai dengan pelaksanaan di lapangan baik yang berbasis digital maupun penempatan perwakilan seperti di Johor dan Kuala Lumpur.

Model politik luar negeri berbasis kerakyatan ini juga merekam kebijakan luar negeri secara periodik sehingga merupakan sebuah perilaku dari Indonesia di luar negeri dan Malaysia khususnya. Perilaku luar negeri Indonesia ini baik yang merupakan rangkaian implementasi kebijakan harian, mingguan dan bulanan menjadi sebuah pola.

Perilaku yang muncul dari pemerintah Indonesia dalam perlindungan WNI di Malaysia tampak dari kantor perwakilan yang mencerminkan pelayanan terhadap jutaan WNI terutama yang bekerja di Malaysia. Dalam kunjungan ke lapangan tampak bahwa Indonesia memberikan ruang kepada WNI untuk mendapatkan pelayanan dokumen dan keimigrasian serta hukum yang diperlukan.

Indonesia juga menjaga payung perjanjian diplomatik dengan Malaysia untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada WNI yang bekerja di negeri jiran ini. Dengan adanya kesepakatan dari Indonesia dan Malaysia ini maka perilaku Indonesia dalam tataran pemerintah kepada Malaysia juga memperhatikan kepentingan negara tujuan.

2.6 FEEDBACK DARI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kebijakan luar negeri berdasarkan model ini kemudian menjadi umpan balik bagi lingkungan domestik dan internasional. Dalam berbagai kasus perlindungan WNI

di Malaysia ini lalu menjadi masukan bagi kebijakan pengiriman tenaga kerja di tingkat domestik. Di tingkat domestik ini tidak hanya menjadi domain Kementerian Luar Negeri tetapi juga lembaga lainnya seperti Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI.

Kebijakan luar negeri yang pro rakyat ini kemudian setelah diimplementasikan dan dimonitor akan muncul feedback sebagai evaluasi juga sehingga menjadi masukan bagi lingkungan di dalam dan luar negeri. Lingkungan inilah kemudian yang memberikan masukan kepada konteks kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan oleh struktur pengambil kebijakan.

Fungsi feedback ini akan terus berjalan selama kebijakan itu dilaksanakan untuk perubahan atau perbaikan. Fungsi feedback ini dapat digunakan dalam kerangka kebijakan lebih luas dari politik luar negeri yang pro rakyat.

BAB III

PENUTUP

Model Politik Luar Negeri Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Pelaksanaan Diplomasi yang Bermartabat merupakan kerangka model dalam *foreign policy decision making* secara detail. Dengan mengambil kasus kepada perlindungan WNI dan Badan Hukum di Malaysia maka terbentuklah model politik luar negeri seperti yang digambarkan di atas.

Dengan model seperti itu, sebenarnya terbuka peluang untuk pengembangan model ini baik dalam detailnya maupun dalam prosesnya. Misalnya bagaimana *foreign policy decision making* dalam menghadapi situasi krisis. Bagaimana struktur dan partisipan juga bertindak ketika normal dan krisis. Basis pemodelan yang ada ini dapat menjadi basis untuk melakukan kajian politik luar negeri Indonesia dengan berbagai kondisi dan kasus.

Model ini masih pada tahap awal pengembangan sehingga menjadi besar kemungkinan menjadi model untuk analisis lainnya atau untuk diperbaiki dalam menangani kasus-kasus lainnya seperti diplomasi ekonomi atau diplomasi budaya. Model ini memberikan basis dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan model politik luar negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Connelly, Aaron L. 2014. *Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi*. The Lowy Institute for International Policy.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2014. *Rencana Strategis 2015-2019*. Jakarta: Kemlu RI
- Rosati, Jerel A. 1981. Developing a Systemtic Decision-Making Framework: Bureaucratic Politics in Perspective. *World Politics*, Vol 3 No. 2, pp 234-252.
- Situmorang, Mangadar. 2015. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Pemerintahan Jokowi-JK". Dalam *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 11, No 1.
- Setiawan, Asep dan Endang Sulastri. 2017. *Politik Luar Negeri Berbasiskan Kerakyatan*. Jakarta: UMJ Press
- Setiawan, Asep dan Endang Sulastri. 2017. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ Press.